BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Adapun Kesimpulan yang diperoleh dari peneliti dalam meneliti kajian ini adalah sebagai berikut:

1. Peraturan mengenai tindak pidana penyalahgunaan narkotika oleh anggota militer telah diatur dengan jelas dalam UU No. 35/2009 tentang Narkotika, yang merupakan bagian dari hukum positif Indonesia. Dalam kasus dengan putusan Nomor: 28-K/PM II-11/AD/VII/2022, hakim menerapkan Teori Makna Biasa, yaitu interpretasi gramatikal yang menekankan makna literal kata-kata dan frasa sesuai pemahaman umum, tanpa memperluas atau mengubah arti teks hukum.
2. Putusan akhir hakim dalam tahap purna ajudikasi terhadap yakni, terdakwa dijatuhi hukuman penjara selama 1 tahun, dengan masa tahanan dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan, serta tambahan hukuman berupa pemecatan dari dinas militer. Hukuman ini sesuai dengan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35/2009 tentang Narkotika, yang menetapkan sanksi maksimal empat tahun penjara untuk pelaku penyalahgunaan narkoba golongan I. Hukuman tersebut mempertimbangkan faktor-faktor yang meringankan, seperti keterbukaan terdakwa yang mempermudah

persidangan, tidak adanya catatan hukuman sebelumnya, rasa penyesalan terdakwa, dan janjinya untuk tidak mengulangi perbuatannya. Terdakwa juga tidak dianggap sebagai korban, sehingga Majelis Hakim memutuskan bahwa rehabilitasi medis maupun sosial tidak diperlukan. Tidak ada upaya hukum lebih lanjut, seperti banding atau kasasi, yang diajukan.

B. Saran

1. Saran untuk Panglima TNI:

- Meningkatkan pengawasan internal dengan menerapkan kebijakan tes narkoba secara rutin dan acak.
- Membangun fasilitas rehabilitasi dan pemulihan yang khusus untuk anggota militer yang terlibat dalam kasus narkoba

2. Saran untuk Anggota TNI:

- Melaporkan jika mengetahui adanya indikasi penyalahgunaan narkoba di antara rekan-rekan.
- Memahami hak dan kewajiban sebagai anggota TNI terkait kebijakan anti-narkoba serta prosedur yang berlaku.

3. Saran untuk Pengadilan Militer:

- Menegakkan hukum secara konsisten dengan memberikan sanksi yang sesuai dengan tingkat pelanggaran.
- Memastikan proses pengadilan transparan dan akuntabel dengan publikasi hasil putusan secara terbuka.